



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak pada masyarakat melalui reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim RB Kemenko PMK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RB Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. pengarah;
 - b. tim pelaksana;
 1. ketua;
 2. wakil ketua;
 3. tim reformasi birokrasi general; dan
 4. tim reformasi birokrasi tematik;
 - c. sekretariat; dan
 - d. tim evaluator internal dan penjamin kualitas.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi serta menetapkan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan masyarakat; dan
 - c. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berjalan dengan konsisten, terarah sesuai dengan *road map*, dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan sesuai rencana aksi yang tertuang dalam *road map* reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. mendorong keselarasan program dan kegiatan agen perubahan dengan rencana aksi reformasi birokrasi;
 - d. melakukan inisiasi dan pengembangan serta terobosan inovatif pada agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - e. melakukan analisis risiko secara berkala dan menyusun strategi mitigasi secara adaptif;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - g. menyusun ...

- g. menyusun laporan secara berkala atas kemajuan, kendala, dan capaian atas implementasi rencana aksi;
- h. berkontribusi pada peningkatan pencapaian indikator sasaran *grand design* reformasi birokrasi nasional dan memastikan ketercapaian target indikator keberhasilan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- i. memastikan agar pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik dapat memberikan dampak pada masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan nasional; dan
- j. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh gugus tugas yang terdiri atas unsur pemerintah, ahli, praktisi, dan/atau mitra pembangunan.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administratif dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. memberikan dukungan teknis terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- c. mengkompilasi laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik; dan
- d. memberikan dukungan teknis untuk pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik pada Sistem yang disediakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

KETUJUH : Tim evaluator internal dan penjamin kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi mandatori tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional;
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi internal kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional setiap triwulan; dan
- f. menjamin kualitas untuk memastikan rencana aksi pada setiap bidang kerja telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik.

KEDELAPAN: ...

- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim RB Kemenko PMK dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

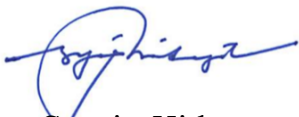
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- B. Tim Pelaksana
1. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 2. Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan.
 3. Tim Reformasi Birokrasi General
 - a. Bidang Peningkatan Kualitas Kinerja dan Sumber Daya Manusia
 - 1) Ketua : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas.
 - 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia.
 - 3) Anggota :
 - 1) Ario Rikson, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama;
 - 2) Muhammad Rafif Hidayatullah, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama;
 - 3) Fajar Rejeki, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan
 - 4) Agnan Ronaldo, Perencana Ahli Pertama.
 - b. Bidang Reformasi Hukum dan Penguatan Organisasi
 - 1) Ketua : Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.
 - 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.
 - 3) Anggota :
 - 1) Vidya Kartika, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 2) Rajendra Bisma Arsana P., Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan
 - 3) Falistya Pratiwi, Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - c. Bidang Tata Kelola Aset dan Arsip
 - 1) Ketua : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan.
 - 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Umum dan Keuangan.
 - 3) Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Edy Wiyanto, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Biro Umum dan Keuangan; dan
 - 3) Trias ...

- 3) Trias Kus Pujiastuti, Arsiparis Ahli Pertama.
- d. Bidang Transformasi Digital dan Satu Data
 - 1) Ketua : Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerja Sama.
 - 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi.
 - 3) Anggota :
 - 1) Theophanie Oktrianti A.L. Solin, Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 2) Richa Marcelina Purba, Pranata Komputer Ahli Pertama; dan
 - 3) Amalia Fitriana Rahmawati, Statistisi Ahli Pertama.
- e. Bidang Peningkatan Integritas dan Pengawasan
 - 1) Ketua : Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.
 - 2) Wakil Ketua : Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - 3) Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat;
 - 2) Abdul Aziz, Auditor Ahli Pertama;
 - 3) Fuad Rochman, Analis Pengawasan;
 - 4) Rahmat Faisal, Analis Pengawasan.
- f. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 1) Ketua : Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.
 - 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan.
 - 3) Anggota :
 - 1) Ihti Oktarina, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya;
 - 2) Olivia Christine Pangaribuan, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - 3) Achmad Soleh, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda; dan
 - 4) Tratama Helmi Supanji, Pranata Humas Ahli Pertama.
4. Tim Reformasi Birokrasi Tematik
 - a. Tematik Pengentasan Kemiskinan
 - 1) Ketua : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan.
 - 2) Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan.
 - 3) Anggota :
 - 1) Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi;
 - 2) Erlia Rahmawati, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 3) Nani Rohani, Analis Kebijakan Ahli Madya
 - 4) Dina Junita Nara, Perencana Ahli Madya;
 - 5) Heri Sukoco, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya;
 - 6) Haris Djayadi, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 7) Ismi Nabila, Perencana Ahli Pertama;
 - 8) Utary Rezki Sakinah, Analis Kebijakan Ahli Pertama;

- 9) Annissa Haq, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 10) Anggit Cisantra, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 11) Khaira Dhamira, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan
 - 12) Indra Bayu Sulakso, Analis Kepemudaan.
- b. Tematik Peningkatan Kualitas Akses dan Layanan Kesehatan
- 1) Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan.
 - 2) Wakil Ketua : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
 - 3) Anggota :
 - 1) Hendri Jupiter, Perencana Ahli Madya;
 - 2) Laode Muhammad Talib, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 3) Diana Sista Dewi, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 4) Ratna Sofiana Lestari, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 5) Muhammad Ilham Mardjuki, Perencana Ahli Muda;
 - 6) Hilman Febri Nanda, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan
 - 7) Septi Amanatul Basyiroh, Perencana Ahli Pertama.
- c. Tematik Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan
- 1) Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan.
 - 2) Wakil Ketua : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan.
 - 3) Anggota :
 - 1) Asisten Deputi Penanganan Bencana;
 - 2) Noegroho Andy Handoyo, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 3) Hestiana Endriantari Wisudaniati, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 4) Dedy Siswoyo Setiawan, Perencana Ahli Muda;
 - 5) Handayani, Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 6) Marcelino Vincentius Poluakan, Perencana Ahli Muda;
 - 7) Alifa Fauziah Hardiani, Perencana Ahli Pertama;
 - 8) Rendra Darari Fakhri Ikranagara, Perencana Ahli Pertama; dan
 - 9) Nurul Izzah Ramadhani, Analis Pemberdayaan Perempuan.
- d. Tematik Mendorong Hilirisasi
- 1) Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan.
 - 2) Wakil Ketua : Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri.
 - 3) Anggota :
 - 1) Muhammad Ivan, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 2) Danang Ari Wibowo Ichwan, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya;
 - 3) Bayu ...

- 3) Bayu Priyo Jatmiko, Analis Kebijakan Ahli Muda;
- 4) Heru Hermawan, Analis Kebijakan Ahli Pertama.

e. Tematik Peningkatan Investasi

- 1) Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.
- 2) Wakil Ketua : Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti.
- 3) Anggota :
 - 1) Subkhan Awaludin, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 2) Hikmah Rafika Mufti, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 3) Dwi Haryono, Analis Anggaran Ahli Muda;
 - 4) Raisha Putri Cinderasmara, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 5) Freddy Akbar Kusworo, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 6) Irfan Patria, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama;
 - 7) Muhammad Khoironi Ishaq, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan
 - 8) Rizki Ahmad Nugraha, Analis Kesehatan.

f. Tematik Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

- 1) Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial.
- 2) Wakil Ketua : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana.
- 3) Anggota :
 - 1) Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar;
 - 2) Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 3) Ayu Dewita, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 4) Sachran Saputra, Perencana Ahli Madya;
 - 5) Titisari Ramandini, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 6) Ratna Kusuma Dewi, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 7) Wahyuni Aristyanti, Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 8) Moh. Fani Fatkhur Rohman, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 9) Raden Sigit Anindya Dasdiandono, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 10) Lioner Octo Gurusinga, Perencana Ahli Pertama;
 - 11) Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan
 - 12) Afi Ardika Tito Primadani, Analis Pendidikan.

D. Sekretariat

1. Ketua : Kepala Bagian Manajemen Kinerja.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;

2) Kepala ...

- 2) Kepala Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- 3) Kepala Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- 4) Kepala Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
- 5) Kepala Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
- 6) Theodorus Evander Wana, Perencana Ahli Pertama;
- 7) Adinda Sekar Ramdhani, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- 8) Wendy Rafika Primandoko, Pengolah Data; dan
- 9) Imaria Agustiany Simanjutak, Analis Perencanaan Strategis.

E. Tim Evaluator Internal dan Penjamin Kualitas

1. Ketua : Inspektur.

- a) Bidang Evaluator :
 - 1) Triardi Syamsudin, Auditor Ahli Muda;
 - 2) Nurkamila Zahra Mulyani, Auditor Ahli Pertama;
 - 3) Nada Aulia Pertiwi, Auditor Ahli Pertama; dan
 - 4) Muhammad Bramantyo, Auditor Ahli Pertama.
- b) Bidang Penjaminan :
 - 1) Silvanie Leane Christy Tompodung, Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 2) Arif Maelan Khasani, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya;
 - 3) Dewi Mai Linda, Analis Hukum Ahli Madya;
 - 4) Novita Sara Kusuma, Arsiparis Ahli Muda;
 - 5) Adinda Nusantara, Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 6) Zeinnuri Adlan Rusmin, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda;
 - 7) Pittus Magitya, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 8) Ardian Maulana, Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 9) Wisnu Marjoko, Perencana Ahli Pertama;
 - 10) Putri Nova Purnama, Pustakawan Ahli Pertama; dan

- 11) Firman Pratomo Putro, Analis
Pengawasan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat